

## **KEPEMIMPINAN NASIONAL DALAM PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS**

**Bambang Wahyudi**

Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Indonesia  
Sentul Bogor Jawa Barat

e-mail: [buangwahyu@yahoo.com](mailto:buangwahyu@yahoo.com)

Naskah diterima: 30/09/2018 revisi: 18/10/2018, disetujui:  
20/10/2018

### **ABSTRAK**

Salah satu isu dalam proses globalisasi diantaranya berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, perubahan politik, ekonomi dan sosial. Selanjutnya diikuti dengan munculnya berbagai konflik. Seperti konflik etnis, konflik separatis, konflik perebutan kekuasaan dan distribusi ekonomi di beberapa negara dan telah berubah menjadi suatu hal yang lazim. Posisi Indonesia secara geografis, geostrategis dan geopolitik secara langsung akan terpengaruh oleh arus perubahan dunia, sehingga membangun manusia Indonesia sebagai warga masyarakat global merupakan perkembangan peradaban manusia yang tidak bisa dielakkan. Perubahan baik pada tingkat global maupun regional merupakan kenyataan yang harus dihadapi dan diperhitungkan sekaligus merupakan peluang bagi Indonesia untuk mempertahankan kepentingan nasional dan mencapai tujuan nasional. Dalam situasi krisis, terkait permasalahan politik, ekonomi dan supremasi hukum serta potensial konflik yang lebih bersifat laten dibutuhkan modal solusi kompetitif yaitu kualitas sumber daya manusia, terutama kepemimpinan nasional yang mempunyai wawasan strategis, dan mempunyai komitmen serta kompetensi dalam bingkai nasionalisme.

Kata kunci: Kepemimpinan, Perubahan, Strategis, Wawasan

## **A. Pendahuluan**

Permasalahan baru dalam proses globalisasi diantaranya berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, perubahan politik, ekonomi dan sosial. Selanjutnya diikuti dengan munculnya berbagai konflik. Seperti konflik etnis, konflik separatis, konflik perebutan kekuasaan dan distribusi ekonomi di beberapa negara dan telah berubah menjadi suatu hal yang lazim.<sup>1</sup> Indonesia dihadapkan pada berbagai perubahan dan pergeseran kekuatan dalam lingkungan strategis global maupun regional yang terus bergerak dan berkembang akan membawa dampak pada berbagai aspek hubungan antar negara termasuk Indonesia.

Globalisasi pada sisi lain mengandung implikasi terhadap berbagai kebijakan dan kualitas manajemen nasional masing-masing bangsa. Posisi Indonesia secara geografis, geostrategis dan geopolitik secara langsung akan terpengaruh oleh arus perubahan dunia, sehingga membangun manusia Indonesia sebagai warga masyarakat global merupakan perkembangan peradaban manusia yang tidak bisa dielakkan. Perubahan-perubahan tersebut baik pada tingkat global maupun regional merupakan kenyataan yang harus dihadapi dan diperhitungkan sekaligus merupakan peluang bagi Indonesia untuk mempertahankan kepentingan nasional dan mencapai tujuan nasional.

---

<sup>1</sup>Menurut Baskoro, konflik memiliki cakupan yang cukup luas meliputi pertentangan atau persaingan atau gangguan oleh kelompok secara fisik atau benturan antar kekuatan-kekuatan yang sulit didamaikan, atau pertentangan kualitas seperti ide-ide, kepentingan-kepentingan atau kehendak-kehendak. Semua makna konflik tersebut tampaknya pada waktu reformasi cukup ramai terjadi di Indonesia.

Tujuan nasional merupakan pedoman penyelenggara pemerintahan, yakni mewujudkan "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial" (Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea 4).

Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai keberagaman etnis, perwujudan nasionalismenya banyak diwarnai oleh permasalahan politik, ekonomi dan etnisitas serta agama, sehingga berbagai permasalahan tersebut menjadi sulit diselesaikan secara tuntas tanpa melihat dan menghubungkan keterkaitan antara dinamika global dan regional. Menyikapi perkembangan situasi global dan regional yang berubah cepat, bangsa Indonesia harus semakin siap memantapkan kualitas diri agar tidak larut dalam gelombang perubahan. Terkait dengan tuntutan reformasi, bangsa Indonesia ditantang untuk mampu berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat sekaligus mampu merespon dan mengantisipasi setiap perubahan dalam lingkungan strategis global maupun regional. Bangsa Indonesia harus tegak berdiri sebagai bangsa yang bersatu dan utuh, yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia khususnya pada era reformasi, ternyata tidak dapat hanya mengandalkan pada kondisi wilayah Indonesia yang cukup luas dengan berbagai sumber kekayaan alamnya, karena kekayaan dan luasnya sebuah negara

belum cukup dijadikan solusi kompetitif dalam mengatasi problem masyarakat dan proses pembangunan sebuah bangsa. Indonesia pada era reformasi banyak diwarnai persaingan atau pertentangan dan gangguan oleh kelompok baik secara fisik maupun dalam tataran ideologi yang cenderung mengarah pada menurunnya komitmen nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Sebaliknya warna etnonasionalisme dan primodialisme semakin menyeruak dan sudah memasuki berbagai kehidupan masyarakat Indonesia, meskipun belum dapat diukur secara kuantitas namun secara eksplisit dan kualitas hal tersebut dapat dirasakan yang menempatkan Indonesia dalam “situasi krisis”.

Dalam situasi krisis, terkait permasalahan politik, ekonomi dan supremasi hukum serta potensial konflik yang lebih bersifat laten dibutuhkan modal solusi kompetitif yaitu kualitas sumber daya manusia, terutama kepemimpinan nasional yang mempunyai wawasan strategis<sup>2</sup>, dan mempunyai komitmen serta kompetensi dalam bingkai nasionalisme, artinya secara kompetitif dapat mengemas perkembangan lingkungan strategis yang mengalami krisis dan cenderung menampakkan sosok ketidakseimbangan atau ketidakadilan yang menimbulkan problem besar nasional menjadi proses pembangunan bangsa dan negara sesuai amanat Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea 4 tentang tujuan nasional bangsa Indonesia.

---

<sup>2</sup>Menurut Prabowo, kepemimpinan strategis merupakan kepemimpinan yang memiliki kemampuan untuk menciptakan harmonisasi antara tuntutan lingkungan eksternal organisasi (dunia) dengan visi, misi, strategi dan organisasi. Mereka bekerja dalam konteks strategis di lingkup Nasional dan mungkin saja di lingkup regional maupun internasional.

Di samping itu untuk keluar dari situasi “krisis”, sangat membutuhkan seorang pemimpin yang mampu menentukan skala prioritas masalah, mengoptimalkan sumber daya dan mengkoordinasikan secara efektif serta memiliki kesabaran untuk menuntaskan penyelesaian akar masalah sehingga Indonesia dapat keluar dari situasi krisis.<sup>3</sup>

Pemimpin yang tampil sangat dibutuhkan untuk merajut kemajemukan masyarakat dan politik, serta didukung rakyat secara luas agar suatu pemerintahan dapat mengembangkan kebijakan secara efektif terutama dalam menghadapi krisis, sekaligus menyadarkan banyak kalangan bahwa “Kepemimpinan Nasional” yang berkompeten adalah sesuatu yang dibutuhkan seiring dengan kemajuan demokratisasi di Indonesia<sup>4</sup>, dan mampu merespon tantangan masa depan dalam irama demokrasi untuk mencapai tujuan nasional, karena semangat reformasi cenderung berlebihan justru seringkali menyebabkan situasi krisis politik yang melibatkan kekuatan massa<sup>5</sup> sebagai alat untuk merealisasikan kepentingan-

---

<sup>3</sup>Menurut Kusnadi, Indonesia membutuhkan Kepemimpinan yang berpandangan kedepan dan siap untuk memikirkan bagaimana memimpin bangsa ini melalui masa-masa sulit dan mau mengedepankan kepentingan jangka panjang bangsa untuk mencapai tujuan.

<sup>4</sup>Menurut Sayidiman, Pemimpin Nasional perlu mengorganisasi dukungan politik yang kuat dan luas agar segala usahanya dapat memperoleh dukungan semaksimal mungkin dari masyarakat.

<sup>5</sup>Pergerakan massa dalam mencapai tujuan politik kelompok tertentu atau usaha mempengaruhi opini, seringkali melibatkan massa bayaran melalui penyedia atau penggerak massa yang biasa dikenal dengan sebutan Direktur PT. DEMO. Sekarang ini masih menjadi trend dan dijadikan sebagai lapangan kerja baru. Sementara menurut Miall, mobilisasi massa dengan melihat strategis dan tindakan komersial merupakan upaya untuk menelusuri jejak

kepentingan sektoral. Meski hal ini sah dalam demokrasi namun dapat menimbulkan kerawanan sosial dan dapat mengakibatkan konflik fisik yang membawa korban jiwa dan material serta merugikan rakyat. “Demokrasi” demikian maknanya menjadi sumir dan dapat dipersepsikan sebagai “Poliarki”<sup>6</sup> yang mengakibatkan terjadinya erosi kepercayaan terhadap pilar-pilar bangsa dan negara Indonesia yang wilayah geografisnya dari Sabang sampai Merauke dan berada dalam satu sistem pemerintahan birokratis dengan semboyan kesatuan dan persatuan yakni satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air, sehingga menampilkan dukungan rakyat yang bersifat semu sehingga berpengaruh signifikan terhadap pola pikir dan manajemen nasional yang dapat melemahkan eksistensi kepemimpinan nasional dan sangat beresiko terhadap perjalanan demokrasi itu sendiri, karena hanya mengutamakan kepentingan jangka pendek yang belum tentu menguntungkan jangka panjang, cenderung pragmatis dan belum mencerminkan kemandirian sebagai bangsa Indonesia.

---

terkait ketidakpuasan yang diartikan sebagai mobilisasi massa, menentukan tujuan dan strategi yang pada akhirnya mengerahkan tantangan terhadap pemegang kekuasaan. Ini jelas sekali integral dengan pembentukan konflik.

<sup>6</sup>Poliarki, yakni sebuah sistem yang merujuk pada sekelompok kecil individu yang benar-benar memiliki kekuasaan dan terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan dan sebelumnya memberikan kesempatan kepada mayoritas untuk memilih mereka dalam bersaing melalui pemilihan umum. Poliarki adalah sebuah Retorika demokrasi yang sama sekali belum melibatkan kekuasaan (*Cratos*) dari massa rakyat (*Demos*) karena kekuasaan berakhir setelah kelompok kecil tersebut berkuasa, disisi lain kelompok mayoritas cenderung terabaikan.

## **B. Prospek Kepemimpinan Nasional.**

*"What wrong is my Country or Nation"*, ucapan dan ungkapan senada sering kali kita dengar dari berbagai kalangan yang disampaikan dengan mimik geram dan penuh tanda Tanya. Entah kapan ungkapan tersebut akan mendapat jawaban menyejukkan, tidak hanya sekedar retorika atau tebar pesona namun tetap menunjukkan adanya ketimpangan antara harapan dan kenyataan artinya ada masalah krusial yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia seperti gejolak politik, supremasi hukum dan distribusi sumber daya. Berbagai interpretasi jawaban sering bermunculan yang disuarakan melalui berbagai media, namun masih sedikit elemen masyarakat yang menyoroti sejauhmana peran pemimpin maupun kualitas kepemimpinan yang memiliki prospek kepemimpinan nasional sebagai salah satu alternatif dalam mengelaborasi jawaban dari pertanyaan tersebut. Meskipun hal ini belum dapat memberikan jaminan sebagai hubungan aksi dan reaksi atau sebab akibat dalam memberikan solusi.

Kompleksitas problematik yang terjadi sudah seharusnya diurai disesuaikan dengan mekanisme atau problem solving melalui manajemen resolusi konflik, karena *"what wrong"* dapat diidentikkan dengan konflik kepentingan politik/kekuasaan, ekonomi/sumber daya, sosial budaya/ premordialisme dan supremasi hukum. Jika diibaratkan sebagai pohon konflik maka sulit ditemukan akar konfliknya apalagi diubah menjadi menjadi bunga perdamaian. Sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa

Indonesia, damai dalam pengertian nyaman beraktifitas dan berkreasi serta semangat kebhinekaan dalam NKRI.

Masalah sentral nasionalisme, seperti bagaimana mengelola atau mentransformasikan perselisihan primordial yang berkaitan dengan identitas, sehingga menggeser kebanggaan nasionalisme kearah kebanggaan etno nasionalisme, terjadi mobilisasi kelompok-kelompok oleh satu pihak menuju pada kontra mobilisasi yang mereka anggap sebagai lawan, akan mengarah pada penyimpangan bentuk-bentuk diskusi keteraturan politik sesuai mekanisme demokrasi, karena demokrasi dapat menyediakan pondasi untuk membangun penyelesaian yang efektif dan awet bagi kepentingan jangka panjang negara.

Dinamika konflik yang secara sengaja atau tidak sengaja dipertontonkan dalam euforia reformasi, merupakan sebuah ekspresi heteroginitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru akibat adanya perubahan.<sup>7</sup> Esensi perubahan merupakan perubahan kultur, diambil dari suatu kata kiasan yang berarti adanya ide suatu pengolahan, proses mengerjakan dan mengembangkan kultur baru, kita akan tergantung dari pola perkembangan untuk merefleksikan sistem sosial dan berkaitan dengan pengetahuan, ideologi, nilai-nilai hukum serta kegiatan sehari-hari. Menurut Kusnadi, pelajaran bagi para pemimpin masa depan adalah mampu mengakomodasikan perubahan, prinsipnya : *"they will not resist change ; they will embrace it"*. Agar para pemimpin peduli dengan perubahan,

---

<sup>7</sup>Kusnadi, "Environmental Scanning", MK. UNHAN 28 September 2009.



termasuk perubahan suatu organisasi atau pembentukan organisasi yang lebih efektif dan efisien.

Cara kita menangani konflik diantaranya dengan mengubah respon kebiasaan dan menentukan pilihan-pilihan tepat, sehingga tidak hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan para pihak yang berseberangan tetapi juga perubahan sosial, psikologi, politik dan jika memungkinkan diadakan insentif selektif yang relevan serta kemampuan sosial atau institusional untuk menentukan apakah penyelesaian atau solusi kompetitif yang diambil dapat diterima dan berdaya guna oleh para pihak tersebut serta pihak lain yang terimbas (masyarakat Indonesia), karena tanggung jawab pertama dan utama untuk mencegah, mengelola dan mentransformasikan hubungan tidak seimbang yang mengalami (mis komunikasi) terletak pada para pemimpin nasional.

Pemimpin<sup>8</sup> adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk melakukan usaha bersama mengarah pencapaian sasaran-sasaran tertentu, sedangkan kepemimpinan adalah hubungan dimana satu orang yakni

---

<sup>8</sup>Pemimpin secara harfiah adalah "*leader*" ( *to lead* ) berarti bergerak lebih awal, berjalan di depan, mengambil langkah pertama, berbuat paling dulu, memelopori, mengarahkan pikiran - pendapat-tindakan orang lain, membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya. Sementara menurut Kusnadi, ada tiga peran dasar pada kegiatan kepemimpinan yang akan datang ( *three roles of a leder* ) yaitu (1) panduan ( *Pathfinding* ), (2) Pelurusan ( *Aligning* ) dan (3) Pemberian kewenangan ( *empowering* ). Disamping itu ada tiga hal penting yang mampu membawa perubahan bagi seorang pemimpin yakni (1) *All change is self-change*, (2) *With self-change you get emotions*, (3) *Change requires self-leadership*.

pemimpin mempengaruhi pihak lain untuk bekerja sama secara suka rela dalam usaha mengerjakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan.

Fenomena yang ada, para pemimpin nasional mulai kehilangan imajinasinya seperti bagaimana mengatasi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terus berkembang dan bagaimana mempertemukan serta mempersatukan kebijakan politik, di samping menjauhkan arah-arrah kebijakan penanganan krisis yang realistis, penentuan skala prioritas, keberanian mengambil keputusan strategis yang tepat dan bagaimana menggalang dukungan rakyat yang riil (tidak semu), sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional<sup>9</sup> atau kepemimpinan masa depan di era yang penuh transparansi dan menuntut adanya sistem yang menuntut terselenggaranya keadilan serta kepemimpinan yang mempunyai wawasan strategis dalam menghadapi krisis multi dimensi atau tantangan perkembangan strategis khususnya yang bersifat nasional dengan mengajak pihak-pihak terkait dan memberdayakan elemen-elemen kekuatan

---

<sup>9</sup>Di tengah-tengah gerak reformasi dan demokratisasi sekarang ini terjadi erosi kepercayaan terhadap pilar-pilar bangsa dan Negara yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk merevitalisasi atau mereaktualisasi kepercayaan serta Nasionalisme tersebut dapat dilakukan dengan cara menggugah, meningkatkan kesadaran, pemahaman, semangat dan komitmen terhadap Wawasan kebangsaan. Diperlukan banyaknya jumlah pemimpin yang memiliki wawasan kebangsaan yaitu pemimpin yang Pancasilais, setia pada NKRI dan UUD 1945 serta memahami karakter dan kultur bangsa Indonesia (Lokakarya Kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan, Bandung Agustus 2007).

Nasional.<sup>10</sup> Kepemimpinan tersebut dibangun melalui pendekatan intelektual dan moral yang secara cerdas serta bijak memanfaatkan dinamika global maupun regional untuk kepentingan nasional maupun lokal disertai dengan kemampuan menguasai berbagai keterampilan kepemimpinan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Strategis

Kepemimpinan strategis yaitu kepemimpinan efektif dan akseptabel memiliki “kemampuan strategis” dalam merencanakan, memimpin dan menggerakkan orang lain atau organisasi untuk melakukan kegiatan yang bersifat atau berimplikasi strategis.<sup>11</sup> Kepemimpinan strategis dapat dibangun atas dasar perpaduan dari karakter, integritas dan komitmen.

a. Karakter<sup>12</sup>. Karakter seorang pemimpin sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam menerapkan kepemimpinannya.

---

<sup>10</sup>Elemen-elemen kekuatan Nasional merupakan kumpulan dari kekuatan politik, geografis, ekonomi, sumber daya alam, kapasitas industri, keuangan, jumlah penduduk, kekuatan moral bangsa, ilmu pengetahuan, teknologi dan kemampuan militer serta hak bela Negara yang dimiliki oleh setiap warga Negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (Paskal, Vol 2, No. 9 – 2004).

<sup>11</sup>Menurut Prabowo, kepemimpinan strategis, mengandung pengertian (1) Pemimpinnya berada pada tataran strategis, (2) proses dan produk kepemimpinannya / keputusannya bernilai strategis, (3) Pemimpin yang memiliki kemampuan berfikir dan bertindak strategis serta memimpin pada tingkatan strategis. Sementara Pemimpin yang efektif dituntut memiliki kemampuan, kecerdasan emosional yang tinggi seperti (1) mengembangkan ketrampilan komunikasi efektif, (2) mengembangkan keahlian interpersonal, (3) mau membantu orang lain agar orang itu dapat menolong dirinya sendiri.

<sup>12</sup>Menurut Yudhoyono, karakter merupakan kearifan untuk mengetahui hal-hal yang benar atau salah dan keberanian untuk memilih yang benar apapun resikonya.

Karakter yang baik dan kuat memberikan kekuatan bagi seorang untuk memiliki keberanian memilih hal-hal yang benar dan melaksanakannya.

- b. **Integritas.** Integritas merupakan kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya meskipun situasi yang dihadapi sangatlah sulit. Seseorang yang berintegritas tinggi adalah orang yang menceburkan diri pada lingkungannya, bekerja dan berkarya sekaligus merasakan kesatuan dirinya dengan alam dan masyarakat sekitar, senantiasa mencari dan berusaha mengerti apa yang harus dikerahkan demi kepentingan lingkungannya. Dia adalah seseorang yang memiliki kesatuan kata dengan perbuatannya dan selalu berusaha untuk menghasilkan yang terbaik. Pada prinsipnya integritas merupakan integritas antara etika dan moralitas. Semakin keduanya terintegrasi, semakin tinggi integritas yang ada.
- c. **Komitmen.** Komitmen yang jelas terhadap kepentingan nasional dibangun melalui pendekatan intelektual dan moral disertai dengan usaha menguasai berbagai keterampilan yang dibutuhkan dalam proses pencapaian tujuan. Komitmen sebagai Pemimpin Nasional, setidaknya dapat berperan sebagai tokoh nasional yang dapat mempersatukan atas pertikaian sektarian, untuk keselamatan NKRI dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Disamping itu komitmen seorang pemimpin diperlukan

untuk menghadapi gerakan reformasi yang perkembangannya justru dapat menjadi salah satu faktor potensial mendorong terjadinya disintegrasi bangsa dan ada kelompok yang berusaha memanfaatkan reformasi untuk mengubah negara kesatuan menjadi federasi serta yang lebih ekstrim hendak memisahkan suatu daerah menjadi negara tersendiri, artinya merdeka atau lepas dari NKRI.

## 2. Membangun kepemimpinan nasional

Membangun kepemimpinan nasional yang kuat, berkompeten dan kredibel. Kebutuhan akan pemimpin yang terampil dalam merajut kemajemukan politik yang cenderung terlena oleh semangat reformasi berlebihan, hingar bingar politik multi partai akan menghasilkan peta kekuatan politik yang menyebar tanpa adanya mayoritas tunggal, maka kepemimpinan nasional yang berkompeten adalah sangat dibutuhkan agar dapat mempertemukan dan mengolah beragam kepentingan politik hingga menghasilkan pola saling dukung yang kuat.<sup>13</sup>

Tanpa adanya keterampilan mengelola dan mengakomodasi keberagaman partai politik, maka

---

<sup>13</sup>Menurut Sayidiman, perlu ada kepemimpinan politik yang bermutu di Pusat dan daerah, kepemimpinan yang memahami dan melaksanakan Pancasila. Hal itu memungkinkan pembagian wewenang yang di satu pihak memperkuat dan memajukan NKRI, dipihak lain mewujudkan perkembangan dinamika daerah untuk mencegah timbulnya separatisme. Makin banyak kemajuan yang dicapai NKRI di segala bidang merupakan perekat utama yang membuat daerah berkepentingan untuk tetap berada dalam lingkungan NKRI.

kepemimpinan nasional bisa dirundung banyak masalah<sup>14</sup>, ketika hal tersebut terjadi maka tugas bersama untuk menyelesaikan krisis menjadi terbelengkalai. Dinamika eksekutif dan legislatif sering mengalami perubahan dari situasi tenang, berjalan baik bisa melonjak penuh ketegangan hingga menciptakan krisis politik yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Krisis politik sering terjadi baik ditingkat pusat maupun daerah, di samping dampak dari krisis tersebut belum menemukan solusi yang menyeluruh dan tuntas, sehingga diperlukan kepemimpinan yang kuat, berkompeten dan kredibel serta mampu memahami berbagai aspek politik negara, ekonomi dan informasi yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

### **C. Perubahan Paradigma Kepemimpinan Nasional.**

Perubahan paradigma kepemimpinan nasional perlu menggeser atau mengubah kepentingan dirinya sendiri menjadi kepentingan pelayanan yang lebih baik. Perubahan paradigma tersebut cukup signifikan dalam mengarahkan kehidupan

---

<sup>14</sup>Menurut Direktur Lembaga Survey Trust Indonesia, Banyaknya menteri yang berasal dari beberapa Parpol, membuat masyarakat pesimis terhadap KIB II, bisa menjawab tantangan masa depan dengan baik dibidang ekonomi, teknologi maupun pembangunan bangsa. Bagaimana menteri-menteri tersebut bisa bekerja dengan baik jika tidak memiliki *back ground* yang kuat. Alasannya banyak menteri yang berasal dari Parpol tidak sesuai dengan tempat keahliannya, karena sangat kental sekali dengan aroma balas budi dan cenderung mengorbankan profesionalitas.

masyarakat agar lebih maju dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Di samping itu dibutuhkan pemimpin yang mau mendengarkan dan memberikan tauladan. Kepemimpinan demikian secara tidak langsung ditujukan untuk mengubah suatu kondisi dalam menjalani sesuatu yang lebih baik. Ketika kepemimpinan tidak langsung (*Indirect Leadership*) menjadi menonjol, masyarakat akan mengatakan bahwa “kita telah mengerjakan sendiri”. Berangkat dari dinamika politik reformasi yang lebih mengedepankan primordialisme, dapat menciptakan kesulitan tertentu pada masyarakat yang multi etnik karena kepemimpinan nasional maupun daerah dijadikan simbol dominasi kelompok atau etnik tertentu dan munculnya ketaatan semu yang menimbulkan bentuk simbolik “aku” dan “kamu” yang seharusnya dihindari karena lebih baik muncul “kita”.

#### **D. Peningkatan Profesionalisme kepemimpinan<sup>15</sup>**

Profesionalisme kepemimpinan sangat dibutuhkan oleh negara dan para pemimpin bawahan yang senantiasa mengharapkan

---

<sup>15</sup>Menurut Prabowo, Pemimpin yang baik : (1) fokus pada pelaksanaan tugas pokoknya, (2) membangun kerja sama (mampu memimpin para pemimpin), (3) menggerakkan seluruh potensi dan dapat memotivasi, (4) pengambilan keputusan strategis. Sementara TNI mengenal adanya 11 Asas Kepemimpinan TNI, yakni (1) Taqwa, (2) Ing ngarso sung tulodo, (3) Ing madya mangun karso, (4) Tut wuri handayani, (5) Waspodo purbo wiseso, (6) Ambeg parama arto, (7) Prasojo, (8) Satyo, (9) Gemi nastiti, (10) Beloko, (11) Legowo. Sementara menurut Huntington, Perwira Profesional di zaman modern merupakan satu kelas social yang baru dan mempunyai ciri-ciri dasar seperti (1) keahlian, (2) pertautan (tanggung jawab kepada klien, masyarakat atau Negara), (3) korporatisme (kesadaran kelompok dan organisasi birokrasi) dan (4) ideologi.

pemimpin strategis dan profesional, baik individu maupun institusi, mampu berkreasi untuk meningkatkan kualitas individu atau organisasi yang dipimpinnya agar dapat menyikapi perubahan sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan. Di samping itu dapat mengembangkan kemampuannya dalam suatu tim (*Team work Leadership*), bukan lagi memimpin yang berbeda dalam posisi “mengatur” dan “memotivasi” terhadap anak buahnya, bahkan tidak juga berupaya membangun partisipasi dari orang-orang yang dipimpinnya, melainkan harus mampu membangun keterlibatan yang tinggi dari timnya, agar senantiasa mau belajar berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan tidak bersifat responsif tetapi harus proaktif dan antisipatif.

#### **E. Kesimpulan**

Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai keberagaman etnis, perwujudan nasionalismenya banyak diwarnai oleh permasalahan politik, ekonomi dan etnisitas serta agama, sehingga berbagai permasalahan tersebut menjadi sulit diselesaikan secara tuntas tanpa melihat dan menghubungkan keterkaitan antara dinamika global dan regional. Menyikapi perkembangan situasi global dan regional yang berubah cepat, bangsa Indonesia harus semakin siap memantapkan kualitas diri agar tidak larut dalam gelombang perubahan. Terkait dengan tuntutan reformasi, bangsa Indonesia ditantang untuk mampu berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat sekaligus mampu merespon dan mengantisipasi



setiap perubahan dalam lingkungan strategis global maupun regional.

Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia khususnya pada era reformasi, ternyata tidak dapat hanya mengandalkan pada kondisi wilayah Indonesia yang cukup luas dengan berbagai sumber kekayaan alamnya, karena kekayaan dan luasnya sebuah negara belum cukup dijadikan solusi kompetitif dalam mengatasi problem masyarakat dan proses pembangunan sebuah bangsa. Indonesia pada era reformasi banyak diwarnai persaingan atau pertentangan dan gangguan oleh kelompok baik secara fisik maupun dalam tataran ideologi yang cenderung mengarah pada menurunnya komitmen nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Sebaliknya warna etnonasionalisme dan primodialisme semakin menyeruak dan sudah memasuki berbagai kehidupan masyarakat Indonesia, meskipun belum dapat diukur secara kuantitas namun secara eksplisit dan kualitas hal tersebut dapat dirasakan yang menempatkan Indonesia dalam “situasi krisis”.

Dalam situasi krisis, terkait permasalahan politik, ekonomi dan supremasi hukum serta potensial konflik yang lebih bersifat laten dibutuhkan modal solusi kompetitif yaitu kualitas sumber daya manusia, terutama kepemimpinan nasional yang mempunyai wawasan strategis, dan mempunyai komitmen serta kompetensi dalam bingkai nasionalisme, artinya secara kompetitif dapat mengemas perkembangan lingkungan strategis yang mengalami krisis dan cenderung menampakkan sosok ketidakseimbangan atau ketidakadilan yang menimbulkan problem besar nasional menjadi

proses pembangunan bangsa dan negara sesuai amanat Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea 4 tentang tujuan nasional bangsa Indonesia. Di samping itu untuk keluar dari situasi “krisis”, sangat membutuhkan seorang pemimpin yang mampu menentukan skala prioritas masalah, mengoptimalkan sumber daya dan mengkoordinasikan secara efektif serta memiliki kesabaran untuk menuntaskan penyelesaian akar masalah sehingga Indonesia dapat keluar dari situasi krisis. Pemimpin yang tampil sangat dibutuhkan untuk merajut kemajemukan masyarakat dan politik, serta didukung rakyat secara luas agar suatu pemerintahan dapat mengembangkan kebijakan secara efektif terutama dalam menghadapi krisis, sekaligus menyadarkan banyak kalangan bahwa “Kepemimpinan Nasional” yang berkompeten adalah sesuatu yang dibutuhkan seiring dengan kemajuan demokratisasi di Indonesia.

#### **F. Saran**

Fenomena yang ada, para pemimpin nasional mulai kehilangan imajinasinya seperti bagaimana untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terus berkembang, maka dibutuhkan kepemimpinan nasional atau kepemimpinan masa depan di era yang penuh transparansi dan menuntut adanya sistem yang menuntut terselenggaranya keadilan serta kepemimpinan yang mempunyai wawasan strategis sebagai berikut :

- a. Kepemimpinan Strategis yaitu kepemimpinan efektif dan akseptabel memiliki “kemampuan strategis” dalam

merencanakan, memimpin dan menggerakkan orang lain atau organisasi untuk melakukan kegiatan yang bersifat atau berimplikasi strategis. Kepemimpinan strategis dapat dibangun atas dasar perpaduan dari karakter, integritas dan komitmen.

- b. Membangun kepemimpinan nasional yang kuat, berkompeten dan kredibel. Dinamika eksekutif dan legislatif sering mengalami perubahan dari situasi tenang, berjalan baik bisa melonjak penuh ketegangan hingga menciptakan krisis politik yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. sehingga diperlukan kepemimpinan yang kuat, berkompeten dan kredibel serta mampu memahami berbagai aspek politik negara, ekonomi dan informasi yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
- c. Perubahan paradigma kepemimpinan nasional perlu menggeser atau mengubah kepentingan dirinya sendiri menjadi kepentingan pelayanan yang lebih baik. Perubahan paradigma tersebut cukup signifikan dalam mengarahkan kehidupan masyarakat agar lebih maju dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan.
- d. Peningkatan Profesionalisme kepemimpinan, sangat dibutuhkan oleh negara dan para pemimpin bawahan yang senantiasa mengharapkan pemimpin strategis dan profesional, baik individu maupun institusi, mampu berkreasi untuk meningkatkan kualitas individu atau organisasi yang dipimpinnya agar dapat menyikapi perubahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulrachman, Arifin. *Leadership, Teori Pengembangan dan Filosofi Kepemimpinan Kerja*. Jakarta: tt, 1970.
- Anoraga, Panji. *Psykologi Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Baskoro Niti, Rony. *Paradoksai Konflik dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Peradaban, 2002.
- Huntington, Samuel P. *Partisipasi Politik Negara Berkembang (Terjemahan)*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Kardi, Kusnadi. *Environmental Scanning*. Bogor: UNHAN, 2009.
- Miall, Hugh. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Prabowo. *Pengambilan Keputusan*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional (PPSN), 2007.
- . *Kepemimpinan Strategis dalam Organisasi Militer*. Jakarta: PPSN, 2009.
- Susanto AB. *Super Leadership, Leading Others to Lead*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009.

### B. Lain-lain

- Jurnal PASKAL Vol. 2 No. 9, Maret-April 2004.
- Harian Suara Merdeka, 8 November 2009.